

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman kumuh merupakan satu dari berbagai permasalahan yang belum teratasi hingga saat ini di Indonesia. Permasalahan ini juga dialami oleh beberapa negara-negara lain yang sedang berkembang. Beberapa kota besar yang berada di Indonesia seringkali menemui permasalahan permukiman kumuh ini, salah satunya adalah Kota Malang. Kota Malang merupakan kota pada urutan kedua yang terbesar setelah Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Kota Malang mengalami perkembangan yang begitu pesat, baik dalam aspek ekonomi maupun pembangunan dalam bentuk fisik. Perkembangan yang begitu pesat di Kota Malang ini berakibat pada permasalahan permukiman kumuh yang juga mengalami peningkatan.

Jumlah penduduk yang semakin bertambah pada setiap tahunnya menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan permukiman kumuh khususnya pada wilayah Kota Malang. Urbanisasi yang terjadi secara terus menerus juga memberikan pengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah permukiman kumuh di wilayah Kota Malang, karena dengan tidak adanya kontrol terhadap urbanisasi yang kemudian mengakibatkan berkurangnya lahan untuk permukiman di wilayah perkotaan. Hal tersebut kemudian berakibat pada keberlanjutan hidup para penduduk yang melakukan urbanisasi untuk tinggal di lahan yang tidak layak huni seperti permukiman di daerah aliran sungai atau daerah lintasan kereta api. Peningkatan jumlah urbanisasi sendiri disebabkan karena masyarakat yang memiliki keinginan untuk memperbaiki perekonomian sebelumnya dengan berpindah ke wilayah perkotaan dengan tidak memiliki lahan sebagai tempat tinggal, yang menimbulkan adanya permasalahan baru di daerah perkotaan.

Tabel 1.1 Luas Permukiman Kumuh di Kota Malang Tahun 2018

Kecamatan	Luas Permukiman Kumuh Tahun 2018 (Ha)
Klojen	143,17
Sukun	74,28
Kedungkandang	66,48
Lowokwaru	6,01
Blimbing	8,66
Total	298,6

Sumber: Dinas PUPRPKP Kota Malang tahun 2019

Berdasarkan pada angka yang tertera pada data di atas menunjukkan bahwa di Kota Malang luas permukiman kumuh masih pada angka 298,6 hektar, di mana jumlah tersebut masih relative tinggi. Dalam hal ini pemerintah Kota Malang terus bekerja keras melakukan berbagai upaya dengan tujuan dapat mengentaskan permukiman kumuh sampai tuntas di tahun 2020.¹ Lahan yang terbatas dan tingkat kepadatan penduduk di Kota Malang merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan permukiman kumuh di Kota Malang. Hal tersebut juga terjadi akibat kurangnya kemampuan pemerintah Kota Malang dalam menghadapi pesatnya jumlah pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan, sehingga pelayanan infrastruktur bagi masyarakat kurang memadai dan permukiman bagi masyarakat menjadi tidak layak huni.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) bangunan yang tidak teratur, permukiman dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi, dan minimnya kualitas bangunan, sarana dan prasarana merupakan tolak ukur

¹ Publik, “Program Kotaku Tuntaskan 310,38 Ha Kawasan Kumuh Kota Malang” dari <https://malangkota.go.id/2019/08/07/program-kotaku-tuntaskan-31038-ha-kawasan-kumuh-kota-malang/> (diakses tanggal 12 April 2022 pukul 20.26 WIB)

permukiman kumuh karena permukiman tersebut dapat dikatakan sebagai permukiman yang tidak layak untuk dihuni. Kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan merupakan tantangan yang sulit bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota karena akan berdampak pada perekonomian kota. Berdasarkan pada cita-cita bangsa, maka pemerintah Kota Malang merupakan kota yang menetapkan penanganan permukiman kumuh yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2018-2023, yang mana selaras dengan target nasional untuk penanganan permukiman kumuh yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2015-2019 yaitu kota tanpa kumuh.

Dalam mewujudkan 0 hektar kawasan kumuh di Kota Malang, Pemda Kota Malang melakukan kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program KOTAKU. Salah satu Program KOTAKU di Kota Malang diwujudkan dengan adanya revitalisasi kawasan Kayutangan, yang mana kawasan tersebut berada di Kecamatan Klojen yang merupakan kawasan dengan Luas Permukiman kumuh yang paling tinggi di Kota Malang. Kawasan Kayutangan ini merupakan kawasan yang masuk dalam kategori kumuh karena tingkat kepadatan penduduk pada kawasan ini tergolong tinggi. Selain itu, kawasan ini juga merupakan kawasan dengan adanya berbagai cagar budaya Kota Malang. Melalui program KOTAKU ini diharapkan juga mampu membantu upaya pelestarian cagar budaya dan juga mampu mengembangkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut. ²

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) merupakan program yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai upaya yang dilakukan dalam menangani permukiman kumuh di berbagai daerah di Indonesia.

² Sukarelawati, “*Transformasi Kayutangan dari kampung kumuh jadi tujuan wisata heritage*” dari <https://www.antaranews.com/berita/2147382/transformasi-kayutangan-dari-kampung-kumuh-jadi-tujuan-wisata-heritage> (diakses tanggal 13 April 2022 pukul 09.17 WIB)

Melalui Program KOTAKU, pemerintah kota Malang telah banyak kawasan permukiman kumuh yang teratasi khususnya pada kawasan kumuh yang berada di daerah aliran sungai yang ada di Kota Malang³. Program KOTAKU di Kota Malang ini terfokus pada perbaikan secara fisik seperti perbaikan infrastruktur yang menjadi salah satu penunjang bagi masyarakat yang berada di kawasan kumuh untuk melakukan aktivitas. Pembangunan yang dilakukan melalui Program KOTAKU ini dalam kawasan permukiman masyarakat di kawasan Kayutangan adalah dengan memperbaiki jalan dan saluran air.⁴

Melalui Program KOTAKU ini, Pemerintah Kota Malang melakukan revitalisasi di Kawasan Kayutangan. Dalam kegiatan revitalisasi ini tidak hanya melakukan pembenahan pada koridor Kayutangan saja, melainkan juga melakukan penataan di permukiman masyarakat di kawasan Kayutangan tersebut. Adanya revitalisasi ini pemerintah kota berkomitmen akan menjadikan sebagai kawasan pariwisata yang bernuansa *heritage*. Pariwisata Heritage merupakan konsep wisata yang sedang tren pada masa kini di kalangan masyarakat. Ketertarikan masyarakat terhadap wisata heritage semakin meningkat, karena masyarakat khususnya anak muda memiliki ketertarikan untuk berwisata heritage yang di dalamnya terdapat adanya objek wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Objek sejarah menjadi menarik dikalangan anak muda, karena anak muda banyak yang melakukan wisata hanya untuk sekedar mengambil foto yang kemudian akan di upload pada akun media sosial seperti *instagram*, *twitter*, *facebook*, dan lainnya. Pariwisata sendiri merupakan salah satu hal yang memiliki implikasi besar bagi

³ Firdausi, “SK Baru, Kota Malang Segera Entaskan 274 Hektare Kawasan Kumuh” dari <https://www.malangtimes.com/baca/66558/20210422/125500/sk-baru-kota-malang-segera-entaskan-274-hektare-kawasan-kumuh> (diakses tanggal 12 April 2022 pukul 21.14 WIB)

⁴ Muzaki, “Program Kotaku Hapus Kekumuhan Kota Malang” dari <https://www.beritasatu.com/ekonomi/757543/program-kotaku-hapus-kekumuhan-kota-malang> (diakses tanggal 12 April 2022 pukul 21.44 WIB)

pembangunan ekonomi negara, karena dengan adanya pariwisata maka dapat menambah pendapatan ekonomi negara.

Revitalisasi Kawasan Heritage merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Program KOTAKU berdasarkan pada Surat Edaran Surat Edaran Nomor: 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, yang mana lokasi penetapan Kayutangan sebagai penerima manfaat didasarkan pada SK Kumuh Walikota Malang Tahun 2015. Dalam Surat Edaran tersebut terdapat adanya strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh di perkotaan dengan terfokus pada perbaikan secara fisik yang bertujuan untuk menurunkan luas permukiman kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu mengenai Implementasi Program KOTAKU di berbagai Kota di Indonesia:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari, Syahrani, dan Paselle (2019) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mengungkapkan mengenai Implementasi Program KOTAKU dan melihat faktor penghambat dalam proses implementasi. Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat adanya perbedaan penggunaan teori, yang mana dalam penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sedangkan penulis menggunakan teori Merilee S. Grindle. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program KOTAKU belum berjalan dengan baik dalam mewujudkan kawasan lingkungan bebas permukiman kumuh karena adanya beberapa faktor yang menghambat yaitu kurangnya koordinasi dari

pelaksana program, kurangnya partisipasi masyarakat, tidak adanya monitoring, dan juga sasaran program yang belum tercapai.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri dan Megawati (2022) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sidoarjo”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mengungkapkan mengenai Implementasi Program KOTAKU. Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat adanya perbedaan penggunaan teori, yang mana dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Mulyadi sedangkan penulis menggunakan teori Merilee S. Grindle. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program KOTAKU yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR sudah berjalan dengan baik yang memenuhi dalam setiap tahapan yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai penyelesaian. Dimana melalui program ini telah mampu mengurangi jumlah kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christianingrum dan Djumiarti (2019). dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mengungkapkan mengenai Implementasi Program KOTAKU dan melihat faktor penghambat dalam proses implementasi. Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat adanya perbedaan penggunaan teori, yang mana dalam penelitian ini menggunakan teori kesesuaian implementai program oleh David C. Korten sedangkan penulis menggunakan teori Merilee S. Grindle. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya program ini terdapat

adanya penurunan luas kawasan kumuh dari 415 Ha menjadi 118,5 Ha. Dalam penelitian ini juga mengungkapkan adanya faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2019) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mengungkapkan mengenai Implementasi Program KOTAKU. Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat adanya perbedaan penggunaan teori, yang mana dalam penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III sedangkan penulis menggunakan teori Merilee S. Grindle. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program KOTAKU di Kota Pontianak belum sepenuhnya berhasil karena komunikasi belum efektif, belum optimalnya sumberdaya, sikap yang masih acuh dari pelaksana kebijakan, dan juga belum terlaksananya struktur birokrasi.
5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulyadi dan Ramdani (2021) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kebonjati Kota Sukabumi”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mengungkapkan mengenai Implementasi Program KOTAKU. Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat adanya perbedaan penggunaan teori, yang mana dalam penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III sedangkan penulis menggunakan teori Merilee S. Grindle. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Program KOTAKU sudah berjalan

dengan baik selain itu juga terdapat adanya faktor yang menghambat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, jumlah pekerja yang terbatas karena adanya pandemi covid-19, dan adanya pencairan dana yang terhambat serta adanya keterlambatan pengiriman barang dan kondisi cuaca yang tidak mendukung.

6. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rachma dan Widowati (2020) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mengungkapkan mengenai Implementasi Program KOTAKU dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses implementasi. Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat adanya perbedaan penggunaan teori, yang mana dalam penelitian ini menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier sedangkan penulis menggunakan teori Merilee S. Grindle. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Program KOTAKU sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan, selain itu juga terdapat adanya faktor yang menghambat yaitu adanya kendala teknis yang dihadapi ketika pelaksanaan Implementasi dan adanya kesadaran dari masyarakat yang kurang.
7. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhasanah (2019) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mengungkapkan mengenai Implementasi Program KOTAKU dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses implementasi. Dalam penelitian ini juga

terdapat persamaan penggunaan teori, yaitu teori implementasi milik Merilee S. Grindle. Selain itu lokasi penelitian yang digunakan juga memiliki kesamaan yaitu berada di Kota Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Program KOTAKU sudah berjalan dengan baik, selain itu juga terdapat adanya faktor yang menghambat yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat.

8. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri, Sakawati, dan Yamin (2021) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mengungkapkan mengenai Implementasi Program KOTAKU dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses implementasi. Dalam penelitian ini juga terdapat persamaan penggunaan teori, yaitu teori implementasi milik Merilee S. Grindle. Akan tetapi lokasi penelitian yang digunakan juga memiliki perbedaan yaitu pada penelitian ini lokasi penelitian berada di Kabupaten Bone sedangkan lokasi penelitian penulis berada di Kota Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Program KOTAKU sudah berjalan sesuai dengan indikator yang sesuai dengan teori Grindle, akan tetapi masih terdapat dua indikator yang belum berjalan maksimal. Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang menghambat adalah adanya pelaksana program yang masih belum aktif, kurangnya kesadaran masyarakat, dan juga adanya lahan yang terbatas.

Implementasi Program KOTAKU di Kota Malang sendiri mendapat banyak sorotan dari masyarakat Kota Malang, dengan Anggaran dari pemerintah pusat dengan nominal yang cukup besar yaitu 23 M. Melalui berbagai platform media sosial, masyarakat menyampaikan kritik

terhadap adanya pelaksanaan program karena pelaksanaan program yang dilihat oleh masyarakat hanya pada koridor kawasan Kayutangan saja. Dimana pada koridor Kawasan tersebut pengerjaan yang dilakukan melalui Program KOTAKU adanya penanaman batu andesit pada poros jalan dan juga pelebaran trotoar. Penanaman batu andesit tersebut dinilai tidak efisien dilakukan karena jalan tersebut sebelumnya merupakan jalan aspal yang tidak mengalami kerusakan. Koridor Kayutangan merupakan salah satu jalan utama di Kota Malang, penutupan jalan tersebut akibat pelaksanaan program menimbulkan kemacetan di berbagai ruas jalan yang ada di Kota Malang. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang kepada masyarakat belum secara menyeluruh, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya penutupan jalan. Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DALAM REVITALISASI KAWASAN KAYUTANGAN SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA DI KOTA MALANG”

1.2 Rumusan Masalah

Pemaparan latar belakang di atas menjadikan peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program KOTAKU dalam Revitalisasi Kawasan Kayutangan sebagai Kawasan Pariwisata di Kota Malang?
2. Apa Hambatan dalam Proses Implementasi Program KOTAKU dalam Revitalisasi Kawasan Kayutangan sebagai Kawasan Pariwisata di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Program KOTAKU dalam Revitalisasi Kawasan Kayutangan sebagai Kawasan Pariwisata di Kota Malang

2. Untuk mengetahui hambatan dalam Proses Implementasi Program KOTAKU dalam Revitalisasi Kawasan Kayutangan sebagai Kawasan Pariwisata di Kota Malang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan serta wawasan pada bidang ilmu politik di Indonesia yang berkaitan dengan Implementasi program dalam aspek pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana untuk mengatasi permasalahan pada kawasan permukiman kumuh yang dilakukan melalui Program KOTAKU pada tingkat Kabupaten/Kota khususnya pada Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai suatu pembelajaran dan memberikan informasi baru bagi kehidupan masyarakat mengenai Implementasi Program KOTAKU dalam Revitalisasi Kawasan Kayutangan sebagai Kawasan Pariwisata di Kota Malang yang dilihat dari *content* dan *context* kebijakan.

1.5 Definisi Konseptual

1.5.1 Implementasi Kebijakan Publik

Public policy atau kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang mana dibuat dengan terencana dan di dalamnya terdapat adanya berbagai prinsip yang digunakan sebagai tata cara dalam melakukan tindakan, serta memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai.⁵ Berdasarkan pada definisi tersebut maka kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu pedoman yang berupa program maupun aturan yang memiliki berbagai tujuan

⁵ Suharto. 2008. dalam Yanuarsyad. 2020. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang Revitalisasi Kota Lama Semarang Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Sektor Pariwisata. *Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang.*

tertentu yang kemudian digunakan bagi seluruh komponen negara dalam bertindak untuk menghadapi permasalahan yang ada.

Kebijakan publik juga didefinisikan sebagai sebuah kepentingan masyarakat yang tertuang dalam bentuk keputusan.⁶ Kebijakan publik merupakan sebuah aturan yang bersifat mengikat, yang kemudian aturan tersebut harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Apabila dalam penyelenggaraan kebijakan terdapat adanya pihak yang melanggar maka akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi yang telah tertulis dalam kebijakan tersebut. Kebijakan publik sendiri merupakan hasil dari keputusan para aktor politik yang memiliki kepentingan dalam pembuatan kebijakan yang dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan tertentu yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan menurut definisi dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Berbeda dengan pengertian sebelumnya Kebijakan publik menurut Thomas R Dye adalah “*whatever government choose to do or not to do*” yang mana berarti bahwa siapapun yang menjadi pilihan dari pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam hal ini berarti bahwa apabila pemerintah mengerjakan sesuatu ataupun tidak mengerjakan sesuatu dapat dikatakan sebagai kebijakan publik, karena akan berpengaruh dan berdampak pada masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan. Implementasi merupakan sebuah aktivitas pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan sendiri didefinisikan sebagai pelaksanaan sebuah program yang dibuat oleh pemerintah, yang mana dilakukan dengan cara melakukan kegiatan yang sesuai dengan sasaran yang diharapkan dan

⁶ Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

saranan yang digunakan sebagai upaya untuk mewujudkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.⁷ Oleh karena itu, implementasi menjadi sebuah hal penting yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan dengan mempertimbangkan banyak faktor dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud Implementasi program adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam implementasi Program KOTAKU di Kota Malang.

1.5.2 Permukiman Kumuh

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman kumuh merupakan sebuah permukiman yang tidak pantas untuk dihuni oleh masyarakat, karena disebabkan oleh adanya bangunan yang tidak teratur, penduduk yang padat, serta kurangnya kualitas sarana dan prasarana yang ada. Permukiman kumuh dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi disebabkan oleh urbanisasi yang tidak terkontrol, selain itu lahan yang terbatas pada wilayah kota juga menjadi penyebab permasalahan permukiman kumuh itu sendiri.

Berbagai program untuk pengentasan permasalahan permukiman kumuh di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan melakukan upaya mencegah dan meningkatkan kawasan permukiman kumuh yang terdapat di Indonesia dan program KIP (Kampung Improvement Program). Pada saat ini program nasional

⁷ Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press. (Terjemahan)

dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), yang mana Program ini dibuat dan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai sebuah upaya strategis yang dilakukan dengan tujuan supaya dapat mempercepat dalam menangani permasalahan pada kawasan permukiman kumuh yang terdapat di Indonesia.

1.5.3 Revitalisasi Kawasan

Berdasarkan pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Revitalisasi di definisikan sebagai sebuah tindakan dalam upaya menghidupkan kembali, yang mana mempunyai tujuan agar hal tersebut memiliki nilai fungsi kembali. Revitalisasi kawasan merupakan pembangunan kembali dalam suatu kawasan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai dan fungsi dari kawasan. Revitalisasi kawasan sendiri juga dapat diartikan sebagai usaha dengan tujuan untuk menghidupkan kembali suatu kawasan yang telah mengalami kemunduran atau bahkan menjadi tidak berfungsi seiring dengan perkembangan masa, dimana pada masa sebelumnya kawasan itu pernah hidup dan berjaya. Selain menghidupkan kembali, revitalisasi kawasan juga terdapat usaha untuk mengembangkan dan mengendalikan suatu kawasan supaya dapat mendapatkan lagi potensi yang pernah dimiliki pada masa sebelumnya. Oleh karena itu, dengan adanya revitalisasi kawasan diharapkan mampu memberikan manfaat suatu kawasan sehingga kualitas lingkungan suatu kawasan dan kualitas hidup masyarakat dapat mengalami peningkatan.

Dalam upaya menghidupkan kembali sebuah kawasan yang menghadapi kemunduran nilai fungsi, maka revitalisasi sebagai sebuah pendekatan dapat dilakukan dengan cara menata kembali pemanfaatan bangunan dan kawasan, merenovasi bangunan

dan kawasan sehingga nilai ekonomi dan sosial mampu berkembang dan meningkat, dan membenahi kualitas lingkungan hidup di suatu kawasan. Karakteristik dan faktor sosial suatu kawasan merupakan dua hal penting yang akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan dari revitalisasi. Revitalisasi sendiri seringkali dikaitkan dengan permasalahan mengenai konservasi kawasan ataupun bangunan yang memiliki nilai sejarah.

Dalam penelitian ini revitalisasi kawasan dilakukan di Kawasan Kayutangan Kota Malang, dimana kawasan tersebut merupakan kawasan cagar budaya. Menghidupkan kembali Kawasan Cagar Budaya dengan tujuan mengembalikan nilai fungsi kawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, melainkan juga menjadi tanggungjawab seluruh komponen dalam sebuah kawasan tersebut seperti masyarakat. Revitalisasi yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dengan masyarakat dengan cara melakukan pengembangan pada kawasan Kayutangan yang termasuk ke dalam kawasan cagar budaya, dengan tujuan supaya dapat berfungsi sebagai destinasi pariwisata baru yang bernuansa *heritage*. Melalui hal tersebut maka kawasan Kayutangan akan memiliki nilai fungsi sebagai tempat wisata yang kemudian juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat kawasan tersebut yang juga mengalami peningkatan.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Implementasi Kebijakan

Dalam studi kebijakan, pelaksanaan sebuah kebijakan disebut dengan implementasi. Kebijakan sendiri seringkali dibuat oleh pemerintah, yang mana kebijakan yang dibuat tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, pada realitanya justru banyak kebijakan

yang dibuat oleh pemerintah tersebut tidak mampu memberikan solusi dan pengaruh bagi kehidupan negara. Kebijakan tidak dapat menjadi solusi dalam kehidupan bernegara karena kebijakan tersebut tidak dijalankan dan dilaksanakan, sehingga kebijakan hanya sebagai aturan formal saja. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sendiri menjadi sebuah hal yang perlu untuk dilakukan dalam proses kebijakan publik. Adanya implementasi maka akan diketahui apakah sebuah kebijakan mampu menjawab permasalahan di masyarakat ataupun mampu menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (1975) merupakan sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam isi kebijakan, yang mana tindakan tersebut dapat dilakukan oleh individu atau pejabat publik atau kelompok-kelompok baik yang berasal dari swasta maupun pemerintahan.⁸ Sebelum melakukan implementasi, sebuah kebijakan harus sudah merencanakan dan mempersiapkan secara baik mengenai proses implementasi sehingga tujuan dari kebijakan akan tercapai. Apabila dalam implementasi kebijakan tidak terdapat adanya perencanaan dan persiapan yang baik maka sebuah tujuan tidak akan tercapai atau terwujud.⁹

Terdapat dua pendekatan dalam memahami implementasi kebijakan, yaitu pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*, yang mana keduanya merupakan pendekatan utama dalam proses implementasi. Dalam pendekatan *topdown* sebuah kebijakan dibuat oleh pemerintah pada tingkat pusat, akan tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah pada tingkat dibawahnya. Sedangkan dalam pendekatan

⁸Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Halaman 139.

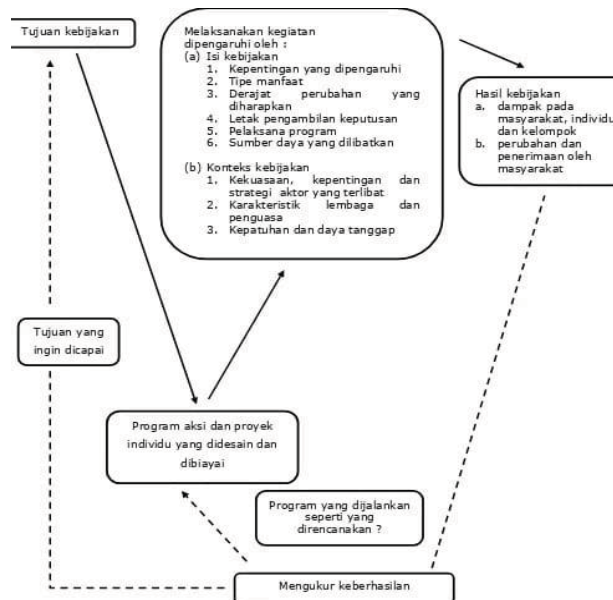
⁹Widodo, Joko. 2016. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing. Hlm 85.

bottom up kebijakan tidak berasal dari pusat melainkan ditetapkan oleh masyarakat dengan permasalahan yang dihadapi.

Merilee S. Grindle (1980) merupakan seorang tokoh yang menganut pendekatan *top down* dalam implementasi kebijakan. Grindle menggambarkan bahwa terdapat dua variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai. Menurut Grindle, tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan yang menjadi tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari 2 hal berikut ini, yaitu:

- 1) Tujuan kebijakan dapat tercapai dengan melihat dari prosesnya, yang mana dapat dilakukan dengan cara mempertanyakan apakah dalam melaksanakan kebijakan telah selaras dengan gambaran (*design*) yang sudah ditentukan, dimana hal ini merujuk pada keputusan dan pelaksanaan dari sebuah kebijakan itu sendiri.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai. Tercapainya tujuan dari sebuah kebijakan dengan melihat dari dampak yang dirasakan ataupun didapatkan masyarakat, dan juga ada atau tidaknya perubahan yang terjadi pada masyarakat ketika kebijakan dilaksanakan.

Gambar 1.1 Implementasi Merilee S. Grindle



Sumber: Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Prince University Press, hlm 11.

Berdasarkan pada Gambar 1.1, terdapat 2 variabel penting yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik, variabel tersebut antara lain yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi/kebijakan (*context of implementation*). Berikut penjelasan dua variabel tersebut:

1. Isi Kebijakan (*content of policy*)

a) Kepentingan yang dipengaruhi

Dalam kebijakan tentunya ada berbagai macam kepentingan-kepentingan, dimana berbagai kepentingan-kepentingan tersebut dapat berasal dari pelaksana kebijakan. Kepentingan tersebut kemudian akan membawa pengaruh terhadap berjalannya implementasi kebijakan selaras dengan tujuan yang hendak divapai atau justru malah menghambat berjalannya implementasi itu sendiri.

b) Tipe manfaat

Dalam kebijakan seharusnya dapat memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan, sehingga akan bermanfaat bagi kelompok sasaran. Dalam sebuah kebijakan tentunya memiliki harapan melalui sebuah kebijakan akan memberikan manfaat bagi kelompok sasaran.

c) Derajat perubahan yang diharapkan

Suatu kebijakan tentu memiliki sebuah maksud yang hendak dicapai. Dimana suatu kebijakan harus dapat menentukan dan menetapkan derajat perubahan yang diharapkan dengan jelas di dalam implementasi kebijakan.

d) Letak pengambilan keputusan

Letak pengambilan keputusan menjadi hal yang penting dalam proses implementasi. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu dijelaskan mengenai dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan dimplementasikan.

e) Pelaksana program

Dalam pelaksanaan kebijakan, pelaksana program atau kebijakan sangat dibutuhkan keberadaannya. Oleh karena itu pelaksana program yang kompeten sesuai dengan bidangnya dapat mendukung keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

f) Sumber daya yang dilibatkan

Sumber daya merupakan hal yang menduduki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud antara lain yaitu sumber daya materi atau dana, metode, dan juga sumber daya manusia. Kebijakan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan apabila implementasi terdapat adanya ketiga sumber daya tersebut.

2. Lingkungan implementasi/kebijakan (*context of implementation*)

a) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi aktor yang terlibat

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh aktor perlu untuk dipertimbangkan dalam upaya memperlancar berjalannya implementasi kebijakan itu sendiri. Jika pelaksana kebijakan atau aktor tidak memiliki kekuasaan dan strategi dalam pelaksanaan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan sebuah kebijakan yang dibuat hanya sebatas formalitas saja.

b) Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan kebijakan seperti rezim yang berkuasa tentunya memiliki pengaruh dalam mencapai keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu apabila rezim yang berkuasa memiliki kepentingan yang berbeda, maka akan menghambat implementasi kebijakan.

c) Kepatuhan dan daya tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena pelaksana kebijakan harus memiliki daya tanggap untuk merespon lingkungan kebijakan. Jika implementor tidak memiliki daya tanggap untuk merespon dalam pelaksanaan kebijakan, maka kebijakan tidak akan berjalan selaras dengan tujuan yang dicita-citakan. Begitu pula dengan kepatuhan dari implementor juga sangat diperlukan supaya tujuan yang diharapkan dalam sebuah kebijakan dapat dicapai. Kebijakan yang dibuat akan menjadi percuma apabila tujuan kebijakan tidak tercapai karena tidak adanya kepatuhan dan daya tanggap dari implementor.

Setelah sebuah kebijakan dilaksanakan dengan menerapkan *content of policy* dan *context of implementation*, kemudian akan diketahui apakah implementor atau pelaksana program dalam proses membuat sebuah kebijakan telah selaras dengan apa yang dicita-citakan, selain itu juga dapat diketahui apakah kebijakan akan mengalami tingkat perubahan apabila dipengaruhi oleh suatu lingkungan.¹⁰

Berdasarkan pada pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Revitalisasi Kawasan Kayutangan sebagai Kawasan Pariwisata di Kota Malang ini sesuai dengan tujuan dari Program KOTAKU. Sesuai dengan model implementasi Grindle dengan pendekatan *top down*, revitalisasi kawasan Kayutangan ini merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan Program KOTAKU dari Kementerian PUPR, dimana dalam hal ini berarti program tersebut merupakan program yang dibuat oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, revitalisasi Kawasan Kayutangan ini merupakan perwujudan dari visi misi Kota Malang yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Malang Tahun 2018-2023, yang mana juga sesuai dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2015-2020 dalam upaya untuk menangani permasalahan permukiman kumuh.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian, yang kemudian peneliti dapat menggali sebanyak-banyak mungkin baik

¹⁰Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Prose Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, hlm 66

informasi dan data dari informan sebagai sasaran penelitian dengan jumlah yang terbatas. Dalam pendekatan kualitatif, sebuah penelitian dikatakan sebagai penelitian yang berkualitas apabila data yang diperoleh oleh peneliti merupakan data yang berkualitas atau juga informasi yang diperoleh semakin dalam.¹¹ Format deskriptif juga digunakan dalam penelitian ini, karena dengan format ini maka peneliti dapat menggambarkan dan menjelaskan berbagai problem di kehidupan masyarakat, dimana problem-problem yang ada di masyarakat tersebut kemudian akan menjadi obyek penelitian.¹² Dengan menggunakan menggunakan tipe penelitian pendekatan kualitatif format deskriptif maka akan diketahui bagaimana proses implementasi Program KOTAKU dalam Revitalisasi Kawasan Kayutangan sebagai Kawasan Pariwisata di Kota Malang yang akan dianalisis menggunakan teori Merilee S. Grindle yaitu *content* dan *context*.

1.7.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus pada proses implementasi Program KOTAKU dalam Revitalisasi Kawasan Kayutangan sebagai Kawasan Pariwisata di Kota Malang. Program-program yang dibuat oleh pemerintah perlu untuk diimplementasikan supaya keputusan yang telah tertuang dalam kebijakan akan memberikan dampak, baik sebagai jawaban maupun solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Apabila program pemerintah tidak diimplementasikan maka keputusan-keputusan pemerintah menjadi sia-sia dan tidak bermanfaat ataupun berdampak bagi kehidupan masyarakat saat ini dan kedepannya, sehingga hal tersebut menjadikan implementasi memegang peranan penting dalam program pemerintahan. Sama halnya dengan yang terjadi di Kota Malang,

¹¹Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Fortmat-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. Hlm 29.

¹²*Ibid.* hlm 48

pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam menanggulangi permasalahan permukiman kumuh maka pemerintah Kota Malang harus membuat program-program yang terpadu dengan tujuan supaya permasalahan permukiman kumuh dapat teratasi. Selain itu dalam penelitian ini berfokus pada proses implementasi dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses implementasi Program KOTAKU dalam Revitalisasi Kawasan Kayutangan di Kota Malang.

1.7.3 Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi dan subjek penelitian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian sendiri merupakan hal yang melekat langsung dengan fokus penelitian yang telah ditentukan di awal, karena apabila fokus penelitian berubah maka lokasi penelitian juga akan berubah begitu pula sebaliknya. Dalam penelitian lokasi yang digunakan penulis adalah di Kota Malang. Peneliti memilih Malang sebagai lokasi penelitian karena Kota ini merupakan Kota yang mempunyai permasalahan terkait dengan permukiman kumuh. Kegiatan revitalisasi kawasan Kayutangan melalui Program KOTAKU dilakukan dengan tujuan mengentaskan permasalahan permukiman kumuh dan menghidupkan kembali kawasan Kayutangan yang pernah berjaya pada masa lampau menjadi destinasi wisata baru yang diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat maupun meningkatkan perekonomian Kota Malang itu sendiri.

Subjek penelitian dalam penelitian dengan metode kualitatif disebut dengan informan. Dalam penelitian ini, penulis memerlukan keberadaan subjek penelitian supaya memperoleh data di lapangan. Melalui informan, peneliti akan memperoleh berbagai macam data dan informasi yang diperlukan selama penelitian berlangsung. Oleh karena

itu, subjek penelitian merupakan bagian yang berperan penting dalam penelitian ini dengan tujuan melalui informan penulis akan mendapatkan data yang dibutuhkan. Lisa Harrison menjelaskan bahwa sebagai penulis menjadi keharusan untuk mengetahui siapa yang akan menjadi informan.¹³ Dalam menentukan subjek penelitian sebagai informan, penulis menggunakan cara *purposive* (disengaja) atas dasar kriteria tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, sebagai berikut:

1. Bapak Erlan Sulistyono
(Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang)
2. Ibu Arum Pawestri
(Kepala Subbidang Sumberdaya Alam Bappeda Kota Malang)
3. Bapak Arif Prasetyo
(Kepala Koordinator Kota Program KOTAKU Wilayah Malang Raya)
4. Ibu Indira Dwi Nanda
(Kasi Pemasaran ekonomi Kreatif Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Malang)

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas.

- a. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh penulis secara langsung dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu dalam pengumpulan. Observasi sendiri yang dilakukan oleh peneliti bertujuan supaya mendapatkan data terkait

¹³Harrison, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: kencana, hlm 12

- dengan topic penelitian, yang mana dilakukan dengan melihat tindakan dan perilaku subjek penelitian dalam implementasi Program KOTAKU dalam revitalisasi Kawasan Kayutangan di Kota Malang.
- b. Wawancara merupakan cara dalam mengumpulkan data yang didapatkan dari kutipan langsung orang-orang mengenai pendapat, pengalaman, pengetahuan, dan perasaan mengenai permasalahan yang diangkat.¹⁴ Teknik ini dilakukan oleh peneliti dengan cara berkomunikasi secara tatap muka dengan informan dan juga menggunakan pedoman wawancara. Melalui wawancara diharapkan mampu memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan validitas dan reabilitasnya. Wawancara secara mendalam dilakukan oleh peneliti kepada subyek penelitian atau informan yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu DPUPRPKP Kota Malang, Instansi Kotaku, Bappeda, dinas-dinas terkait lainnya, dan juga masyarakat yang berkaitan dengan implementasi program KOTAKU dalam revitalisasi kawasan Kayutangan sebagai kawasan Pariwisata di Kota Malang.
- c. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana data yang diperoleh dari teknik ini berupa kutipan, cuplikan, penggalan, dan sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan. Telaah pada dokumen dilakukan untuk membuat temuan data dan pengolahan data yang berbobot sesuai dengan tujuan penulisan, penganalisisan juga digunakan sebagai upaya untuk menilai relevansi temuan data dan menyesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Diman temuan data yang diperoleh dari observasi merupakan pendukung penelitian.

¹⁴Ibid, hlm 104

1.7.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyusun kembali data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan secara sistematis. Dalam teknik analisis data terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu yang pertama dalam melakukan penyusunan data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, maupun wawancara yang dilakukan dengan tujuan supaya dapat memudahkan untuk memahami dan memberikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya teknik analisis data deskriptif juga dapat digunakan oleh peneliti, dimana melalui teknik ini data yang diperoleh kemudian peneliti akan meringkas dan menentukan data-data penting yang diperlukan dalam penelitian. Setelah melakukan dua hal tersebut kemudian peneliti akan menyajikan data dengan menggunakan metode intrepitif, dengan metode ini peneliti akan memberikan intrepetasi mengenai hasil wawancara dan memberikan interpretasi mengenai data dari hasil observasi maupun dokumentasi dengan menggunakan kalimat deskriptif, yang kemudian akan diketahui bagaimana implementasi kebijakan program KOTAKU di Kota Malang.

Dalam melakukan analisis data terdapat tiga kegiatan yang perlu dilakukan dalam waktu bersamaan, yaitu:

1. Reduksi data, reduksi merupakan sebuah kegiatan yang didalamnya terdapat proses penyederhanaan data dengan melakukan abstraksi. Dalam proses abstraksi terdapat adanya upaya untuk membuat ringkasan utama, yang mana bagian proses ini menjadi bagian penting yang harus ada.
2. Paparan data merupakan hal yang di dalamnya terdapat adanya kegiatan menyusun data menjadi sebuah satu kesatuan dalam bentuk kalimat deskriptif

3. Menyimpulkan data merupakan proses yang di dalamnya terdapat aktivitas untuk menyimpulkan makna dari data yang diperoleh kemudian akan diuji kebenarannya dengan teori yang digunakan.